



Spending Review: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018

Dyah Mutiarin¹

Deni Setiawan²

Nurul Huda³

Vindhi Putri Pratiwi⁴

Muhammad Eko Atmojo⁵

1,2,3,4,5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: denisetiawan.psc19@mail.umy.ac.id

Article Info

Keyword:

Keyword 1;
Spending Review.
Keyword 2;
New Institutional
Theory.
Keyword 3;
APBD.

Abstract: *This research seeks to understand the process of budgeting system in Indonesia through the perspective of New Institutional theory and Spending Review. New Institutional is a popular and unequivocal explanation for explaining the actions of individuals and organizations. Spending Review is a method to measure the quality of government spending in the structure of Aceh Revenue and Expenditure Budget (APBA) aceh province. This research uses a descriptive qualitative approach and library review. The results of this study of apba implementation in Aceh Province in fiscal year 2018 have been well underway. The high budget absorption of The Village Fund also proves that the reporting system is practical and able to be understood by village apparatus in Aceh Province. This indicates an improvement in absorption patterns in the more mature and planned Fiscal Year 2018.*

Kata Kunci:

Kata Kunci 1;
Spending Review.
Kata Kunci 2;
New Institutional
Theory.
Kata Kunci 3;
APBD.

Abstrak: Penelitian ini berupaya memahami proses dari sistem penganggaran di Indonesia melalui perspektif teori New Institusional dan Spending Review. New Institusional adalah penjelasan yang populer dan tegas untuk menjelaskan tindakan individu dan organisasi. Spending Review adalah metode untuk mengukur kualitas pengeluaran pemerintah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini pelaksanaan APBA di Provinsi Aceh pada Tahun Anggaran 2018 telah berjalan dengan baik. Tingginya penyerapan anggaran Dana Desa juga membuktikan bahwa sistem pelaporan sudah praktis dan mampu dipahami aparatur desa di Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan perbaikan pola penyerapan pada Tahun Anggaran 2018 yang lebih matang dan terencana.

Article History: Received 6-Agustus-2020, Revised 9-September-2020, Accepted: 13-Oktober-2020

PENDAHULUAN

Pengaruh perekonomian global membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Ibrahim & Halim, 2019). APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menopang keberlangsungan ekonomi Indonesia menghadapi penuh tantangan. Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkualitas di segala dimensi, memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian dengan melakukan penghematan dan pemotongan anggaran pada APBN dan APBN-P untuk kegiatan yang tidak prioritas dan non produktif (Oliver & Bakhtaruddin, 2017).

Sepanjang tahun 2018 perekonomian nasional fluktuatif karena dipengaruhi gejolak global. Selain kebijakan negara lain diantaranya terkait kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat selama sepanjang 2018 menaikkan hingga enam kali, kemudian dilanjutkan dengan *#ShutDown* pemerintahan Donald Trump selama tiga pekan sejak pertengahan Desember 2018 (Ibrahim & Halim, 2019). Menjaga perekonomian nasional agar tumbuh positif ditengah ketidakpastian ekonomi global, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Instrumen atau alat negara untuk mendorong domestik dan menjaga geliat ekonomi nasional dengan memaksimalkan anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kualitas pelaksanaan APBN dalam 3 periode tahun anggaran terakhir semakin baik (Ibrahim & Halim, 2019).

Menurut (Jaelani, 2016), kebijakan anggaran secara tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu gejala politik terkait anggaran sebagai manajemen media anggaran dalam merespons kebutuhan politik perserongan maupun kelompok politik. Penelitian ini untuk mengubah paradigma berpikir dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Implementasi dalam pengelolaan APBN dengan menggunakan struktur anggaran yang berbasis kinerja akan berdampak pada tata kelola yang baik apabila memenuhi indicator sebagai berikut: akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam Penelitian *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang)* melihat penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Penyusunan anggaran dengan pendekatan sistematis agar organisasi disektor public dengan kinerja yang dihasilkan. Penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) untuk membuat anggaran dilaksanakan atau diprioritaskan berdasarkan skala prioritas yang telah di anggarkan (Andriani & Hatta, 2012).

Pelaksanaan Anggaran pada rentang waktu tiga tahun terakhir semakin baik. Penyerapan anggaran dapat dilakukan dengan optimal, target-target kinerja dapat tercapai dengan baik, hingga efisiensi anggaran untuk meningkatkan output kinerja kegiatan lain. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2018, pemerintah tetap berkomitmen untuk fokus prioritas pembangunan pada infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas pada bidang pendidikan dan kesehatan, membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, serta menurunkan gini ratio antar wilayah. Menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla periode 2014-2019 dalam rapat kabinet terbatas yang dikutip (Ditjen Perbendaharaan, 2016) menjelaskan tujuan Spending Review yaitu sebagai:

1. Efisiensi atau penghematan yang dapat diimplementasikan berdasarkan anggaran.
2. Sebagai sarana identifikasi potensi ruang fiskal
3. Sarana Check and balance ditahap perencanaan dan penganggaran.
4. Alat ukur angka baseline. Sebagai pondasi dasar penyusunan Medium-Term Expenditure Framework atau Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.
5. Instrumen atau alat untuk mengukur value for money belanja pemerintah.

Menurut (Robinson, 2017) Salah satu alasan utama pemerintah menggunakan Spending Review adalah untuk mengurangi atau menahan pertumbuhan dan mengatur pengeluaran. Kriteria yang dipakai sebagai berikut:

Relevansi	Apakah program berusaha untuk mencapai outcome bagi masyarakat yang penting?
Duplikasi	Apakah ada duplikasi dengan program atau agensi lain di pemerintahan, atau dengan sektor swasta?
Efektifitas	Apakah program ini mencapai hasil yang dimaksudkan, dan jika tidak, hal itu dapat diperbaiki sehingga tidak demikian?
Efisiensi	Bisakah layanan atau proses diproduksi dengan biaya lebih rendah, tanpa mengorbankan kualitas?
Ekuitas	Apakah distribusi layanan atau transfer pembayaran antara kategori yang berbeda dari penerima secara adil?
Kegagalan Pasar	Apakah pemerintah melakukan sesuatu yang bisa diserahkan ke sektor swasta atau organisasi masyarakat untuk melakukan?

Dengan demikian, inisiatif spending review di Indonesia semakin penting bukan hanya untuk memberikan informasi kinerja anggaran dalam rangka mendorong peningkatan kualitas anggaran, namun juga untuk menjaga kesinambungan fiskal. Perbaikan implementasi spending review juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam memberikan solusi atas permasalahan penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada K/L dan masukan bagi perumusan kebijakan dalam mendorong kualitas anggaran itu sendiri, khususnya di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. Pelembagaan spending review pada sistem penganggaran di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah dalam struktur APBN. Pengeluaran ditinjau untuk membahas aspek teknis dalam implementasi APBN dan mencoba untuk mengidentifikasi setiap pilihan kebutuhan yang dapat diimplementasikan melalui anggaran, dan menghasilkan masukan untuk menformulasikan perencanaan penganggaran dalam tahun anggaran berikut. Spending Review adalah metode untuk mengukur kinerja anggaran dengan penekanan pada nilai-nilai prinsip anggaran (Kristiantoro, et al., 2018).

1.1. Spending Review

"Spending Review" merupakan salah satu "instrumen" atau alat dari reformasi fiskal yang berfungsi untuk menciptakan ruang fiskal dengan mengurangi biaya belanja anggaran dikarenakan adanya perubahan prioritas dan permintaan untuk peningkatan layanan atau peningkatan ukuran kerja (Robinson, 2017). Sejarah mencatat "Spending Review" merupakan kerangka penganggaran berbasis kinerja yang telah banyak dilaksanakan di negara-negara yang melakukan reformasi yang serupa, seperti negara Inggris. Sistem Penganggaran berbasis kinerja sejalan dengan orientasi dari "Spending Review" yang dapat memfasilitasi proses penganggaran. Pada tahun 2011 telah dilakukan survey oleh OECD menunjukkan bahwa "Spending Review" dari 32 negara yang melaksanakan anggaran kinerja, 16 negara melaksanakan "Spending Review" dengan melaksanakan model kinerja berbasis penganggaran dengan cara dan model yang berbeda-beda.

"Says that spending review serves as a process of adopting and developing saving steps based on a systematic supervision on the expenditure budget baseline. In this case, spending review is used as a tool for controlling the government's aggregate expenditure level and to enhance the

determination of expenditure priority." (Organisation for Economic Cooperation and Development)

Spending Review yang dilakuakn di Indonesia masih sebatas pengukuran efisensi untuk melihat "output" dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Robinson ada 3 (tiga) mekanisme untuk melihat proses penyusunan *Spending Review* ditinjau dari penghematan anggaran (Parhusip, 2016).

1. *Bottop-up* melakukan penghematan berdasarkan pilihan yang telah disiapkan oleh pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan.
2. *Joint Review* melakukan penghematan yang dikembangkan secara bersama oleh Kementerian Keuangan.
3. *Top-down review* melakukan pengehamatan dengan keterlibatan terbatas yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.

Kementerian keuangan telah mengembangkan "*Spending Review*" telah mengalami progress dari tahun ke tahun. Dalam melakukan "*Spending Review*" peneliti sangat memerlukan dokumen penganggaran sebagai sumber utama dan document pelaksanaan anggarn (DIPA). Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran dalam hal ini Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

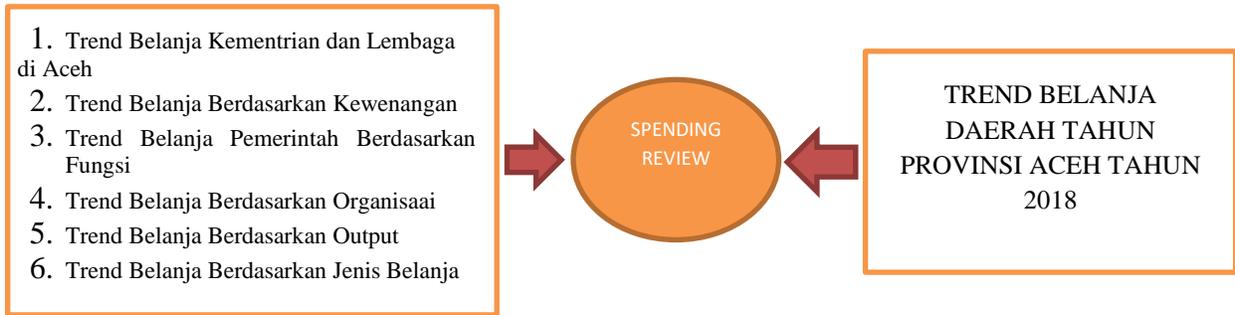
1.2. New Institusional Theory

Keberadaan organisasi sangat tergantung pada kepercayaan publik bahwa organisasi ini adalah entitas yang sah dan layak, untuk mewujudkan eksistensi tersebut, organisasi cenderung adaptif terhadap situasi keberadaan pada eksternal atau sosial (DiMaggio & Powell, 1983). Gagasan ini telah menjadi dasar untuk menerapkan teori kelembagaan baru. Setiap ide, logika, dan praktek dengan beberapa pengaruh dianggap sebagai sah, layak, dan kemudian dilembagakan menjadi bagian integral dari organisasi.

"institutional theory is a popular and firm explanation to explain individual and organizational action" Dacin et al. (2002)

Setiap organisasi publik yang berusaha mendapatkan legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorphism dengan organisasi publik lainnya. Isomorphism adalah gejala di mana organisasi publik menjadi serupa dengan lingkungannya. Hawley (1968) mendefinisikan isomorphism sebagai proses dimana ruang populasi cenderung sama dengan situasi yang memiliki kesamaan (DiMaggio & Powell, 1983). Menurut (Lippi, 2000), Isomorphism dapat dibentuk oleh tiga faktor eksogen, yaitu koersif, mimetik, dan normatif. Coersif Isomorphism terjadi ketika organisasi menerima tekanan sifat paksa dan mengikat dari peraturan hukum. Mimetik isomorphism adalah suatu proses institusionalisasi yang didasarkan pada emulasi atau meniru organisasi lain yang telah berhasil menerapkan sistem. Mimetik isomorphism terjadi ketika para organisasi mengalami ambiguitas tujuan atau belum menentukan tujuan pemotongan yang jelas (Wijaya & Akbar, 2015). Maka akan meniru tujuan dari organisasi lain. Mengenai isomorphism normatif, hal ini didasarkan pada dorongan dari dalam lembaga untuk membuat beberapa perubahan secara profesional ketika organisasi dalam mengadopsi konsep didasarkan pada keterlibatan konsultan atau tim sebagai profesional dengan beberapa keahlian dalam Bidang. Menurut (Lippi, 2000), proses isomorphism juga dapat terjadi karena untuk faktor endogen, seperti aktor, lembaga, sistem pemikiran dan bahasa yang telah ada dalam organisasi. Faktor endogen ini telah menyebabkan proses pelembagaan menjadi bottom up Nature disebut sebagai isomorphism. Isomorphism diwujudkan melalui reinterpretasi pengaruh unsur asing atau rekonsialisasi oleh organisasi publik.

Kerangka Berpikir



METODE

Penelitian ini dilakukan di provinsi Aceh karena salah satu kota di Indonesia yang melakukan "Spending Review" untuk melihat pelaksanaan atau implementasi anggaran di Provinsi Aceh. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Terdapat beberapa alasan untuk menggunakan penelitian kualitatif yaitu: *pertama*, pada saat terdapat suatu permasalahan yang perlu dieksplorasi; dan *kedua*, penggunaan penelitian kualitatif diperlukan karena adanya kebutuhan untuk suatu pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan tersebut. Adanya permasalahan yang timbul dalam upaya penyusunan spending review Kementerian dan Lembaga (K/L) mengakibatkan perlunya mengeksplorasi dan mengkaji mengenai spending review melalui pemahaman komprehensif atas permasalahan dengan menggali konteks, yang tidak dapat diperoleh dari penelitian kuantitatif (Parhusip, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui melalui situs website dari laporan instansi Kementerian atau Lembaga resmi tentang pelaksanaan anggaran di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. Metodologi yang digunakan dalam menyusun laporan review pelaksanaan anggaran dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Data Sekunder yaitu tahap analisis yang menggunakan database atau informasi yang sudah tersedia. Informasi seperti pagu anggaran dan implementasi anggaran seperti aplikasi "MEBE" yang disediakan Direktorat Jenderal Keuangan atau dari situs website serta media cetak.
2. Analisis Data Primer yaitu tahap analisis yang dilakukan dengan menggunakan survei sebagai alat untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Analisis ini merupakan satu metode peninjauan realisasi anggaran yang lebih fleksibel untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan peninjauan. Kegiatan penelitian lapangan dilakukan setelah kajian kepustakaan yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memperkuat argumen atau hipotesis yang diidentifikasi dalam kegiatan penelitian pustaka.

Tahapan penarikan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti dengan melakukan verifikasi atas intepretasi dengan mengecek keseluruhan tahapan. Selanjutnya tahapan dimaksud dilakukan secara berulang (dilakukan dan diulangi terus) setiap setelah melakukan pengumpulan data dengan teknik apapun. Penelitian ini mengadopsi metode analisis dimaksud dengan melakukan kodifikasi, menyajikan data dan menyimpulkan dengan mengembangkan matriks yang berupa temuan penelitian yang selanjutnya akan diinterpretasikan (Parhusip, 2016).

TEMUAN DAN HASIL

Trend Belanja Kementerian dan Lembaga di Aceh

Selama Periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 trend alokasi anggaran untuk belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Provinsi Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 pagu anggaran mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya mampu diikuti dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi. Alokasi anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Provinsi Aceh selama periode tahun 2014

sampai dengan 2018 mengalami trend peningkatan yang cukup signifikan. Mengalami peningkatan pagu anggaran tahun 2018 dibandingkan periode sebelumnya dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi.

Gambar 1. Alokasi Anggaran Belanja Kementerian dan Lembaga



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Berdasarkan data yang disajikan pada Grafik diatas, trend alokasi anggaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk belanja K/L di wilayah Aceh selama periode tahun 2014 sampai dengan 2018. Tahun Anggaran 2016 terjadi penurunan pagu K/L menjadi Rp12,72 triliun dari pagu tahun 2015 Rp13,15 triliun. Pada tahun 2017, Pagu anggaran K/L meningkat menjadi Rp13,23 triliun dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kemlagi menjadi Rp14,59 Triliun rupiah. Hal tersebut disebabkan karena APBN disusun secara realistis menyesuaikan kemampuan ruang fiskal yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disusun sesuai kemampuan ruang fiskal sehingga dapat dioptimalkan oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan grafik dimana trend alokasi anggaran untuk belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) di Provinsi Aceh periode 2014 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan. Sejak tahun anggaran tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp 12,72 trilliun sedangkan pagu pada tahun 2015 Rp 13,15 trilliun. Untuk tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi 13,23 trilliun dan di tahun 2018 meningkat menjadi Rp 14,59 trilliun. Dampak positifnya adalah setiap kegiatan yang sudah disediakan anggarannya dapat dilaksanakan lebih efisien dan lebih berkualitas. Tingkat penyerapan belanja K/L di wilayah Aceh mengalami perkembangan yang cukup positif pada setiap akhir tahun anggaran selama kurun waktu 5 periode anggaran terakhir. Dapat terlihat berdasarkan tingkat penyerapan belanja K/L pada akhir TA 2018 meningkat dari 91,19% menjadi 92,12% pada akhir tahun anggaran 2017.

Tingkat penyerapan anggaran belanja untuk Provinsi Aceh dalm kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan trend positif. Pada akhir tahun 2018 penyerapan belanja 91,19 % menjadi 92,12 % ditahun anggaran 2017. Anggaran yang telah disediakan dapat dilaksanakan lebih efisien dan berkualitas sehingga akan berdampak positif dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Peningkatan pagu anggaran pada tahun 2018 dibandingkan periode sebelumnya mampu diikuti dengan tingkat penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan adanya efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L di daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja serapan anggaran K/L. Untuk kinerja belanja DAK Fisik dan Dana Desa selama 2 periode 2017 dan 2018 disajikan pada Grafik diatas.

Kinerja belanja Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa periode tahun 2017 dan tahun 2018 sesuai dengan grafik diatas, hal ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif dapat meningkatkan kinerja serapan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pagu anggaran di tahun 2018 dibandingkan dengan periode sebelumnya mampu diikuti dengan penyerapan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang telah tersalurkan ke masing-masing Pemkab/Pemkot sebesar 40,14% lebih rendah dari tahun 2017. Penurunan realisasi DAK Fisik merupakan dampak dari perbedaan mekanisme penyaluran DAK Fisik pada tahun 2017 dan 2018. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik mengalami penurunan karena ada perbedaan mekanisme penyaluran pada tahun 2017 dan tahun 2018. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa melalui Pemkab/ Pemkot sebesar 40,14 % lebih rendah dari tahun 2017.

Gambar 2. Realisasi Dana Alokasi Khusus



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Berdasarkan Grafik diatas, pagu alokasi DAK Fisik dan Dana Desa di Provinsi Aceh mengalami penurunan. Terjadinya penurunan tersebut merupakan dampak dari penyesuaian alokasi Dana Desa pada APBN yang disebabkan oleh adanya perubahan cara perhitungan penetapan Dana Desa berdasarkan alokasi formula, alokasi dasar, dan alokasi afirmasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018. Menurut Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan Pagu alokasi Dana Desa mengalami penurunan dampak dari penyesuaian postur APBN yang disebabkan karena perubahan mekanisme perhitungan penetapan Dana Desa sesuai alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi afirmasi.

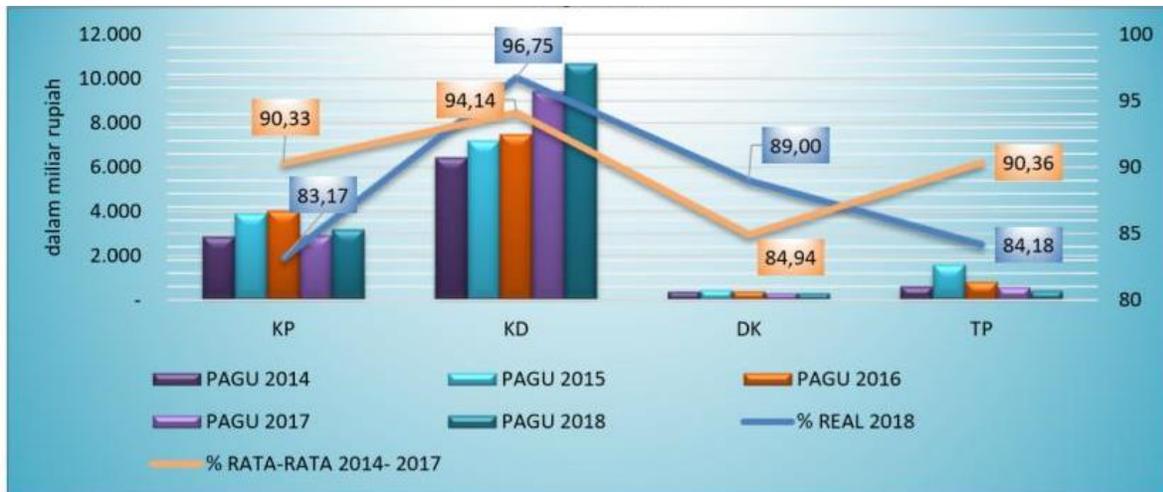
Jika melihat perbandingan periode yang sama pada tahun anggaran yang lalu, kinerja penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2018, DAK Fisik dan Dana Desa yang telah tersalurkan ke masing-masing Pemkab/Pemkot sebesar 97,20% atau senilai Rp 6,96 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 97,62% atau senilai Rp 7,65 triliun. Penurunan realisasi tersebut merupakan dampak dari perbedaan mekanisme penyaluran DAK Fisik pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Fisik pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya dari segi penyerapan. Alokasi anggran dari DAK dan Dana Desa telah disalurkan sebesar 97,62 % atau Rp 6,96 trilliun. Realisasi anggran ini lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 97,62 % atau Rp 7,65 trilliun. Perbedaan mekanisme dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2017 dan 2018 berdampak pada penurunan realisasi anggaran tersebut.

Penyaluran DAK Fisik tahun 2018 tidak lagi hanya berdasarkan rekomendasi penyaluran ke masing-masing Kab/Kota dari Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), namun berdasarkan kontrak yang telah dilaksanakan sesuai bidang DAK Fisik. Hal tersebut menjadi kendala bagi Pemkab/ Pemkot karena terdapat beberapa bidang yang terlambat melaksanakan lelang serta proses kelengkapan dokumen yang membutuhkan waktu penetapan akibat perubahan pejabat yang berwenang di daerah. Kendala dari Pemkab/Pemkot terdapat beberapa bidang, proses pelaksanaan lelang mengalami keterlambatan serta kelengkapan dokumen yang memerlukan waktu penetapan dampak dari perubahan pejabat yang memiliki kewenangan di daerah. Hal ini akibat dari penyaluran DAK Fisik pada tahun 2018 bukan hanya berdasarkan rekomendasi dari kabupaten/ Kota harus ada dari Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK).

Trend Belanja Pemerintah Berdasarkan Kewenangan

Berdasarkan jenis kewenangan, trend realisasi anggaran tahun 2014 hingga tahun 2018 juga mengalami perkembangan yang baik untuk pelaksanaan anggaran pada Kantor Daerah (KD) dan Dekonsentrasi (DK). Grafik dibawah menunjukkan trend realisasi anggaran satuan kerja per jenis kewenangan sampai dengan akhir periode Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan grafik trend realisasi anggaran dari satuan kerja per-jenis wewenang periode 2018. Realisasi anggaran ini dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami trend positif dari segi perkembangan dalam pelaksanaan anggaran .

Gambar 3. Trend Realisasi Belanja Pemerintah Berdasarkan Kewenangan



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Melihat sisi Pagu Anggaran, hanya jenis kewenangan Kantor Daerah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan alokasi pagu anggaran sejak tahun 2014. Satker dengan kewenangan KP mengalami kenaikan pagu anggaran pada tahun 2018. Walaupun kenaikan ini masih dibawah pagu anggaran 2016 yang merupakan pagu tertinggi Satuan Kerja (Satker) dengan kewenangan KP selama 5 tahun terakhir. Hal ini berbeda dengan Satker dengan kewenangan DK dan TP yang selalu mengalami penurunan pagu sejak Tahun Anggaran 2015. Pagu anggaran hanya ditinjau dari segi kewenangan pemerintah daerah pada setiap tahun mengalami peningkatan alokasi anggaran sejak tahun 2014. Satuan Kerja (Satker) dengan kewenangan KP mengalami peningkatan dari pagu anggaran di tahun 2018. Meskipun kenaikan ini masih berada dibawah pagu anggaran ditahun 2016 berada di pagu tertinggi Satuan Kerja (Satker) dengan kewenangan KP sejak 5 tahun terakhir. Sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan padu anggaran.

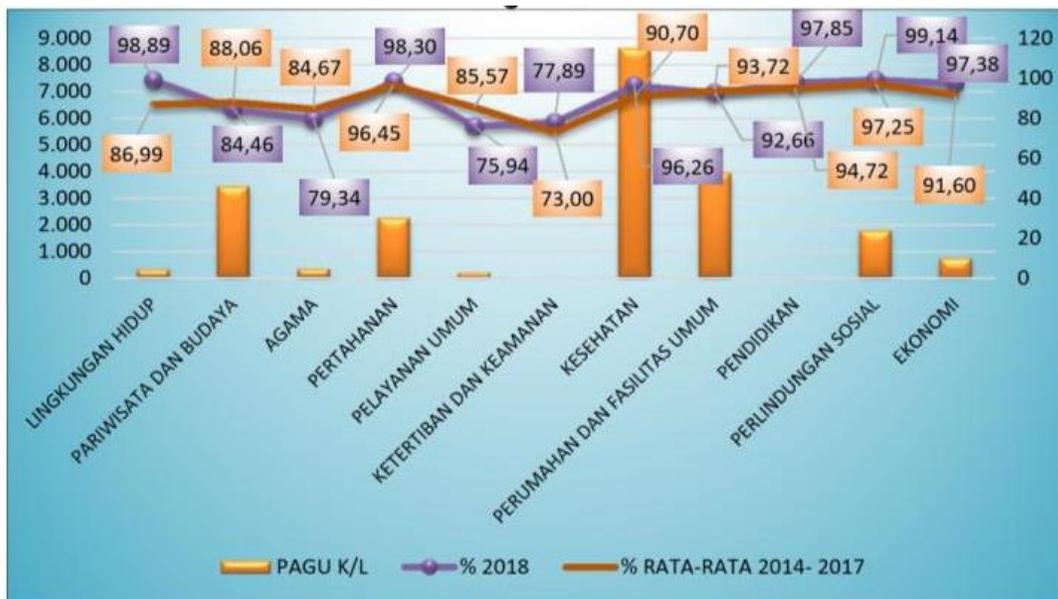
Tingkat penyerapan Satker dengan kewenangan KD dan DK lebih tinggi jika membandingkan

rata-rata penyerapan tahun anggaran 2014 sampai dengan 2017. Hal ini berbeda dengan Satker dengan kewenangan KP dan TP yang mempunyai kinerja penyerapan pada TA 2018 dibawah rata-rata penyerapan. Satker dengan kewenangan KD menjadi satu-satu kewenangan yang mempunyai tingkat penyerapan anggaran diatas 90%. Penyerapan Satuan Kerja (SatKer) dengan kewenangan KD dan DK lebih tinggi tingkatannya dibandingkan tahun 2014 sampai dengan 2017 dari segi penyerapan anggaran. Sedangkan pada tahun anggran 2018 masih dibawah rata-rata dari segi penyerapan anggaran. Tingkat penyerapan anggran berada diatas 90% dari Satuan Kerja (Satker) dengan kewenangan KD yang dimiliki.

Trend Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan klasifikasi fungsi, trend realisasi belanja pemerintah sampai dengan akhir periode TA 2018 terdapat beberapa fungsi yang berada di atas rata-rata penyerapan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Grafik dibawah ini menampilkan trend realisasi per fungsi periode tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018. Terdapat 4 Fungsi yang kinerja penyerapannya pada tahun 2018 dibawah rata-rata penyerapan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Trend realisasi anggaran menurut fungsi periode TA 2014 sampai dengan TA 2018 di wilayah Aceh disajikan pada Grafik dibawah ini

Gambar 4. Trend Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi



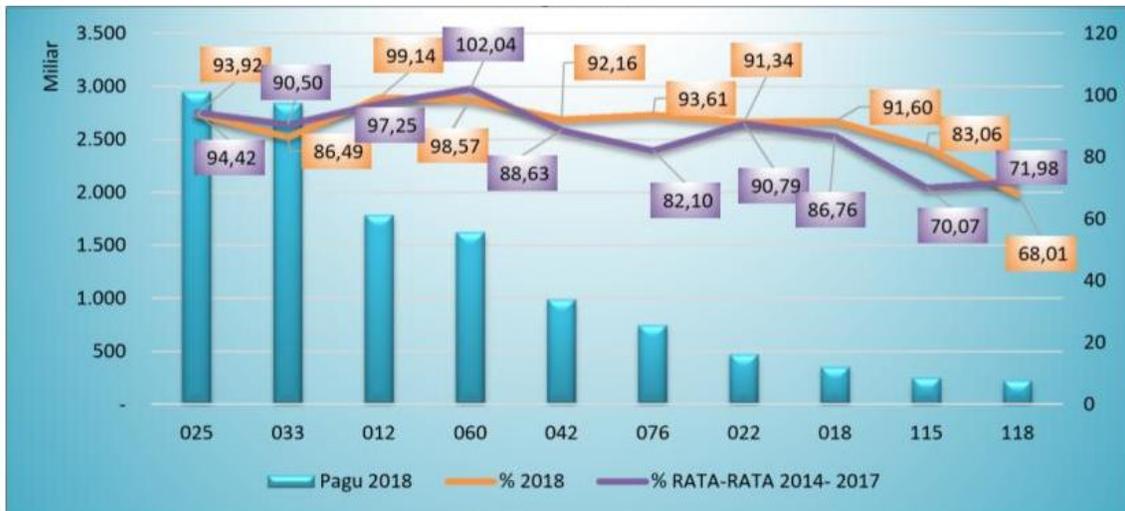
Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018, kinerja penyerapan 7 fungsi lebih baik dibandingkan rata-rata penyerapan TA 2014 hingga TA 2017. 4 fungsi memiliki kinerja penyerapan dibawah rata-rata penyerapan tahun-tahun sebelumnya. Kinerja penyerapan fungsi Pelayanan umum mempunyai disparitas negatif yang paling besar yaitu senilai 9,62% dibawah rata-rata penyerapan 4 periode tahun anggaran sebelumnya.

Trend Belanja Pemerintah Berdasarkan Organisasi

Dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018, lebih dari 85% alokasi belanja K/L di Provinsi Aceh di dominasi oleh 10 K/L yang mempunyai pagu besar. Grafik dibawah merupakan informasi mengenai Trend Realisasi Anggaran menurut 10 K/L Pagu Terbesar selama Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018. Dari 10 K/L tersebut ada 6 K/L mempunyai trend realisasi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan dan sisanya 4 K/L yang mempunyai tingkat realisasi di bawah rata-rata penyerapan Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2017.

Gambar 5. Trend Belanja Pemerintah Berdasarkan Organisasi



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat 6 K/L yang memiliki peningkatan penyerapan pada Tahun Anggaran 2018 dibandingkan dengan 4 periode Tahun Anggaran sebelumnya dalam urutan pagu terbesar yaitu Kementerian Pertahanan (012), Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (042), Komisi Pemilihan Umum (076), Kementerian Perhubungan (022), dan Sekretariat Bawaslu (115). Sedangkan 4 K/L yang mempunyai kinerja penyerapan di bawah rata-rata adalah Kementerian Agama (025), Kementerian PUPR (033), Kepolisian RI (060), dan Kementerian Pertanian dan BPKS Sabang (118). Kementerian Pertahanan mempunyai kinerja penyerapan yang paling baik dan hampir mendekati 100% yaitu sebesar 99,14%. Sedangkan BPKS Sabang menjadi K/L dengan serapan yang paling rendah yaitu 68,1%. Kinerja serapan ini menurun dari rata-rata tahun 2014-2017 yaitu 71,98%. Penyebab rendahnya kinerja serapan anggaran ini dikarenakan adanya penggantian pejabat perbendaharaan pada pertengahan tahun anggaran 2018. Trend realisasi K/L yang memiliki alokasi pagu besar menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan.

Trend Belanja Pemerintah Berdasarkan Kategori Output

Kategori output dalam belanja K/L diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu infrastruktur/ pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, operasional dan pelayanan publik. Trend tingkat realisasi per kategori output sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 disajikan pada Grafik dibawah ini. Alokasi terbesar belanja K/L digunakan untuk kegiatan/pekerjaan yang termasuk ke dalam kategori output operasional dan pelayanan publik. Berdasarkan trend pagu anggaran, kategori output operasional dan kesejahteraan mengalami peningkatan setiap tahun, sedangkan pagu anggaran untuk kategori output infrastruktur dan pelayanan publik mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Namun demikian alokasi pada tahun 2018 pada kedua kategori output tersebut masih lebih tinggi dari alokasi pagu tahun 2014 sampai dengan 2016.

Gambar 6. Trend Belanja Pemerintah Berdasarkan Kategori Output



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Berdasarkan data diatas, terdapat 3 kategori output mempunyai kinerja penyerapan dibawah rata-rata tahun 2014-2017. Kategori output infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi menjadi kategori output yang disparitas penyerapannya paling besar dibawah rata-rata kinerja penyerapan 2014-2017. Berbanding terbalik dengan kategori output Infrastruktur/ pertumbuhan ekonomi, kategori output Pelayanan Publik mempunyai selisih positif yang cukup besar bila dibandingkan dengan kinerja penyerapan rata-rata penyerapan TA 2014-2017. Kinerja penyerapan kategori output pelayanan publik mencapai 95,26%, lebih besar 6,22% jika dibandingkan dengan rata-rata penyerapan TA 2014-2017.

Trend Belanja Pemerintah Berdasarkan Jenis Belanja

Tingkat realisasi per jenis belanja selama periode Tahun Anggaran 2018 menunjukkan performa yang berimbang antar jenis belanja. Grafik 2.20 menyajikan trend penyerapan anggaran berdasarkan kategori belanja Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018. Terdapat 2 dari 5 jenis belanja dapat terserap lebih baik dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tahun 2014 sampai dengan 2017. Jenis belanja tersebut merupakan belanja barang (52), dan belanja bantuan sosial (57).

Gambar 7. Trend Belanja Pemerintah Berdasarkan Jenis Belanja



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Berdasarkan grafik diatas, terdapat 2 jenis belanja dapat terserap lebih baik dibandingkan dengan rata-rata penyerapan tahun 2014 sampai dengan 2017. Jenis belanja bantuan Sosial walaupun mempunyai persentase penyerapan yang lebih tinggi bila dibandingkan jenis belanja yang lain, mempunyai pagu yang kecil yaitu sebesar Rp26 Milyar. Hal ini disebabkan pada TA 2018 terdapat perubahan kebijakan bantuan sosial berupa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa madrasah dan santri ponpes yang dialokasikan pada masing-masing satker dialihkan penyalurannya secara terpusat pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Perubahan kebijakan tersebut mengakibatkan jumlah alokasi belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan. Pada belanja pegawai, kinerja penyerapan pada Tahun Anggaran 2018 lebih rendah jika dibandingkan rata-rata Tahun Anggaran 2014-2017.

Walaupun demikian, penurunan persentase penyerapan ini tidak bisa diindikasikan sebagai kinerja yang kurang baik. Hal ini dikarenakan pembayaran belanja pegawai sesuai dengan hak pegawai. Sehingga lebih sulit untuk meningkatkan realisasi belanja pegawai pada akhir tahun. Sehingga ketika kinerja penyerapan belanja pegawai mengalami penurunan, yang perlu diperhatikan adalah alokasi anggaran yang kemungkinan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan.

KESIMPULAN

Selama pelaksanaan APBA di Provinsi Aceh pada Tahun Anggaran 2018 telah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan realisasi belanja K/L yang mencapai 92,1 persen dengan pertumbuhan penyerapan mencapai 10,3 persen dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut menunjukkan bahwa satker semakin serius melakukan perencanaan anggaran, melaksanakannya hingga proses pertanggung jawabannya. Dengan semakin baik pengelolaan anggaran, APBN sepanjang TA 2018 dinilai mampu menjaga sektor perekonomian dan fiskal, baik level nasional maupun domestik. Meskipun negara lain mengeluarkan kebijakan yang kurang menguntungkan bagi keseimbangan neraca ekspor nasional seperti penghapusan kebijakan *Generalized System of Preferences* (GSP) oleh Pemerintah Amerika Serikat, APBN dinilai mampu memainkan peran untuk menjaga laju pertumbuhan perekonomian on track. Kebijakan penerapan IKPA dengan 12 indikator yang terukur secara kuantitatif dan terkoneksi pada sistem *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara* (OM SPAN), mendorong Satuan Kerja (SatKer) agar lebih baik melakukan perencanaan anggaran, tertib melaksanakan anggaran, dan disiplin mempertanggungjawabkannya.

Pagu anggaran APBN Provinsi Aceh sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21,75 triliun terdiri dari alokasi belanja K/L sebesar Rp14,59 triliun dan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebesar Rp7,16 triliun. Tingkat penyerapan untuk belanja K/L sebesar 92,1%. Sedangkan total anggaran DAK Fisik dan Dana Desa mencapai realisasi 98,25%. Tingginya realisasi belanja pemerintah maupun penyerapan DAK Fisik dan Dana Desa, merupakan hasil dari implementasi IKPA dan proses monitoring penyaluran anggaran yang efektif. Tingginya penyerapan anggaran Dana Desa juga membuktikan bahwa sistem pelaporan sudah praktis dan mampu dipahami aparat desa di Provinsi Aceh. Dilihat dari sisi pola penyerapan anggaran satuan kerja setiap bulan, rata-rata penyerapan TA 2018 sebesar 7,68% lebih tinggi dari TA 2017 sebesar 7,60%. Hal tersebut mengindikasikan perbaikan pola penyerapan pada TA 2018 yang lebih matang dan terencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W., & Hatta, E. (2012). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 7(1), 24–35.
- DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.

- Ditjen Perbendaharaan. (2016). *Belanja Berkualitas, Mengawal Program Prioritas*. 20–23.
- Ibrahim, Z. B., & Halim. (2019). *Reviu Pelaksanaan Anggaran Wilayah Aceh Semester II 2018*.
- Jaelani, A. (2016). *Munich Personal RePEc Archive on the APBN and the Budget Politics in KEUANGAN PUBLIK ISLAM*: (Issue 69652).
- Kristiantoro, H., Basuki, B., & Fanani, Z. (2018). The Institutionalization of Spending Review in Budgeting System in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 36–53. <https://doi.org/10.18196/jai.190190>
- Lippi, A. (2000). One theory, many practices. Institutional allomorphism in the managerialist reorganization of Italian local governments. *Scandinavian Journal of Management*, 16(4), 455–477. [https://doi.org/10.1016/S0956-5221\(00\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S0956-5221(00)00016-6)
- Oliver, J., & Bakhtaruddin. (2017). Review Pelaksanaan Anggaran Wilayah Aceh Semester II 2016. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Parhusip, B. (2016). *Kajian Ekonomi & Keuangan Analisis Implementasi Spending Review pada Kementerian*. 20(3).
- Robinson, M. (2017). The role of evaluation in spending review. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 32(3), 305–315. <https://doi.org/10.3138/cjpe.43177>
- Wijaya, A. H. C., & Akbar, R. (2015). the Influence of Information, Organizational Objectives and Targets, and External Pressure Towards the Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada)*, 28(1), 62–83. <https://doi.org/10.22146/jieb.6230>